

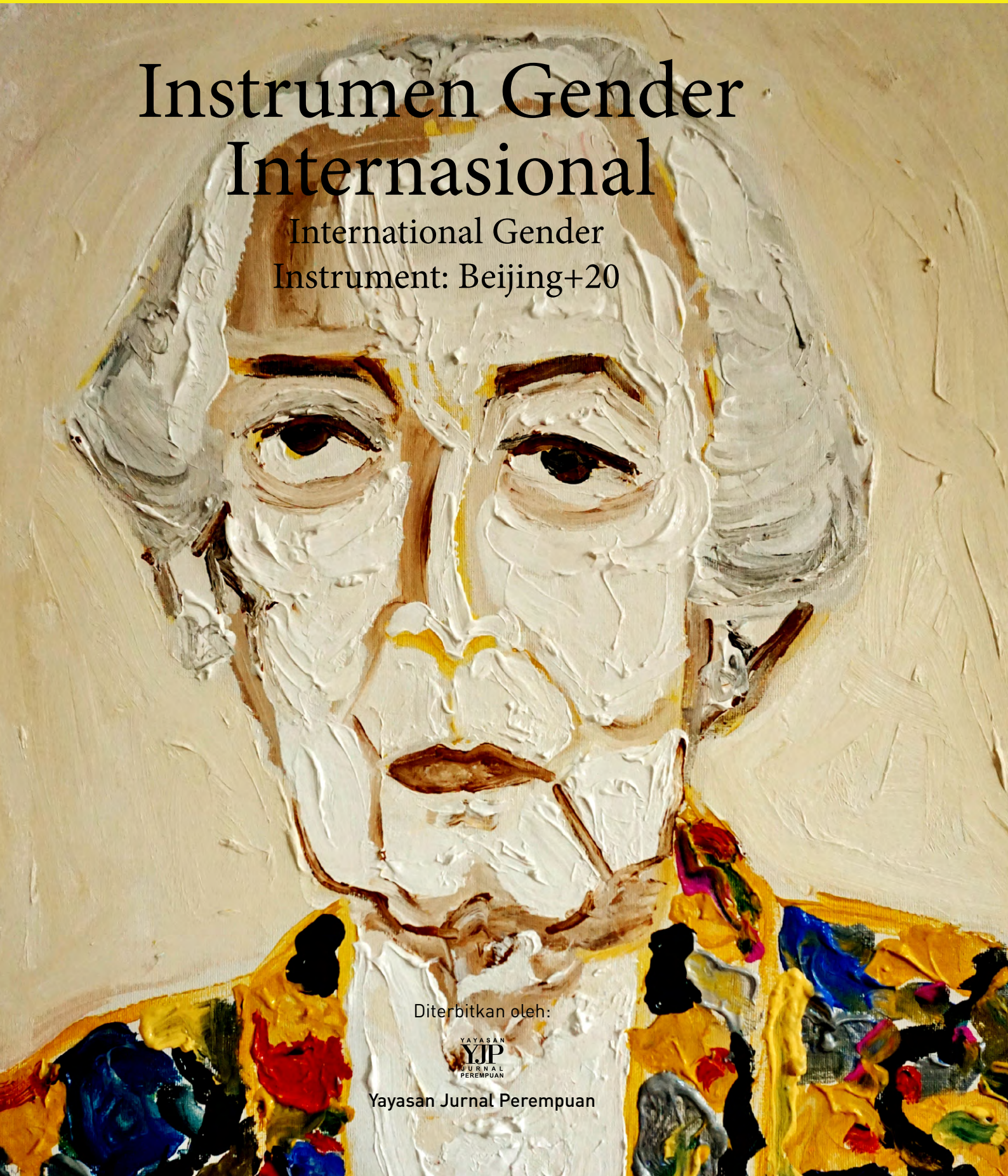
Instrumen Gender Internasional

International Gender
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

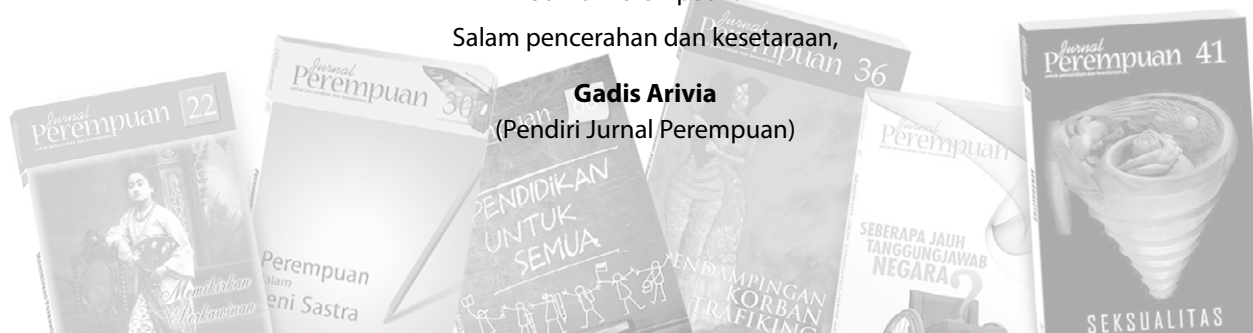
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2015



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> <i>R. Valentina Sagala</i>	81-89
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
Kata dan Makna / Words and Meanings	
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164

Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihal ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok
No.85, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.
Phone:0815-9074-798

Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan

Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)
31901556

Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak

Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan

Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat
45363. Phone:(022) 84288828

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan

Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281. Phone:(0274) 589621

Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia

Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274)
563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotent task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multistakeholder; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan
& Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12,
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-
83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar
pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacific women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.



Patrick Ziegenhain:

“Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara”

Patrick Ziegenhain: “The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women”

Anita Dhewy

Redasi Jurnal Perempuan

anita@jurnalperempuan.com

Prof Patrick Ziegenhain adalah peneliti senior dan dosen di sejumlah universitas di Jerman yakni di Departemen Ilmu Politik Universitas Trier, di Departemen Studi Asia Tenggara Universitas Goethe, Frankfurt dan di Departemen Studi Asia Tenggara Universitas Bonn. Patrick juga pernah menjadi profesor tamu di Departemen Ilmu Politik Universitas De la Salle, Manila, Filipina pada Mei hingga September 2014. Ia memiliki minat utama pada kajian dengan topik demokrasi dan perkembangan politik, sosial dan ekonomi di Asia

Tenggara. Patrick meraih gelar M.A. dalam bidang Ilmu Politik (dengan kajian minor sejarah modern dan filologi Indonesia) dari Universitas Cologne, Jerman pada 1997. Sementara gelar PhD di bidang Ilmu Politik diraih pada tahun 2005 dari Universitas Albert Ludwigs, Freiburg, Jerman dengan tesis berjudul *“From Rubber Stamp to Superbody? The Role of the Indonesian Parliament in the Democratization Process between 1997 and 2004”*. Tesis ini kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *The Indonesian Parliament and Democratization* oleh Institute of Southeast Asian

Studies pada 2008. Selain itu pria kelahiran Jerman 45 tahun yang lalu ini juga meraih gelar *Habilitation* di bidang Ilmu Politik dan Kajian Asia Tenggara dari Universitas Trier, Jerman pada 2014. Patrick menulis sejumlah buku dan artikel di berbagai jurnal baik berbahasa Inggris maupun Jerman. Bukunya yang terbaru berjudul *Institutional Engineering and Political Accountability in Indonesia, Thailand, and the Philippines* diterbitkan ISEAS, Singapura, pada 2015. Publikasinya yang lain diantaranya “*The Aceh Conflict during the Orde Baru and the following Democratization Process*”, dalam: Graf, Arndt/ Schroeter, Susanne/ Wieringa, Erwin (eds.): *Aceh. History, Politics, Culture*, Singapore: ISEAS, 2010, pp. 120-134; “Internal and external challenges for the political systems of Thailand and the Philippines”, dalam: Hanns W. Maull and Martin Wagener (eds.) (2009), *East Asia in an Era of Globalisation*, Baden-Baden: Nomos, 191-208 (in German); dan “The Indonesian Parliament and Its Impact on Democratic Consolidation”, dalam: Marco Bünte and Andreas Ufen (eds.) (2009), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London/ New York: Routledge, 33-52.

Jurnal Perempuan: Bagaimana pandangan anda terkait isu kesetaraan gender di Asia Tenggara? Bagaimana gambarnya secara umum dan tren yang berkembang semacam apa?

Patrick Ziegenhain: Dari sejumlah data yang ada kita tahu bahwa perempuan di Asia Tenggara tidak mempunyai akses yang sama seperti laki-laki atas banyak hal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dengan upah yang layak serta modal dan juga tanah. Dan yang tidak kalah penting, di bidang politik perempuan tidak mempunyai kesempatan, akses dan kekuatan yang sama seperti laki-laki. Namun ada perbedaan diantara sebelas negara di Asia Tenggara, ada situasi sedikit berbeda mengingat ada negara seperti Singapura dan negara seperti Laos atau Kamboja, selain juga ada perbedaan budaya, agama dan situasi sosial. Kalau kita melihat status ekonomi di Asia Tenggara, kita bisa melihat ada perbedaan besar, kita semua tahu Singapura merupakan negara terkaya di Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan per tahun hampir 50 ribu dolar Amerika setahun dan menempati peringkat 18 dunia untuk indeks pembangunan manusia dan termasuk kategori negara yang paling maju. Namun ada juga negara yang lebih miskin di Asia Tenggara contohnya Myanmar atau Kamboja atau Laos. Sementara kalau kita melihat data tentang angka kelahiran, perempuan

yang hidup di negara dengan ekonomi maju cenderung mempunyai lebih sedikit anak. Kita bisa lihat di Singapura, kelahiran per perempuan 1,3, cukup kecil, ini kebalikan dengan negara seperti Filipina dan Indonesia, di Indonesia 2,4 dan di Filipina 3,1 dan lebih banyak lagi di negara seperti Timor Leste yakni lebih dari 5 anak. Kita bisa melihat bahwa angka kelahiran berkorelasi dengan status ekonomi. Kita juga bisa melihat ada korelasi antara negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia dengan tingkat pendidikan perempuan, di dua negara tersebut perempuan lebih banyak ke sekolah menengah daripada Filipina dan negara yang lebih miskin seperti Laos, Kamboja dan Myanmar misalnya. Dan kalau kita melihat rasio anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk universitas/perguruan tinggi, juga lebih tinggi di Singapura dan Malaysia, serta lebih rendah di Laos dan Kamboja.

Jurnal Perempuan: Bagaimana anda melihat kesetaraan gender di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara?

Patrick Ziegenhain: Kalau kita melihat Global Gender Gap Index 2014 yang dikeluarkan World Economic Forum, di sana ada empat indikator yang digunakan yaitu partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kelangsungan hidup dan kedaulatan politik, kita bisa membandingkan antara Indonesia dan Filipina. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa Filipina berada di posisi tinggi yakni peringkat 9 dunia, sementara negara seperti Singapura dan Thailand ada di posisi 59 dan 61 juga Laos ada di peringkat 60, lebih tinggi daripada Indonesia yang ada di posisi 97. Dan jika kita bandingkan antara Filipina dan Indonesia untuk indikator partisipasi ekonomi, Filipina ada di posisi 24 dunia mengingat di Filipina sudah ada banyak pengusaha perempuan, begitu juga perempuan yang duduk di posisi CEO. Sementara Indonesia hanya berada di posisi 108 dunia. Selain partisipasi ekonomi yang jauh berbeda, perbedaan juga tampak di bidang pendidikan. Dalam hal pencapaian pendidikan, Filipina berada di posisi teratas di dunia sedang Indonesia di posisi 78. Begitu juga di bidang kesehatan dan kelangsungan hidup, lebih tinggi Filipina dibandingkan Indonesia. Di bidang politik kita tahu di Filipina sudah lebih banyak perempuan yang terjun di politik, kita juga mengenal presiden perempuan Filipina seperti Gloria Macapagal Arroyo. Jumlah senator dan anggota DPR perempuan juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Jadi jelas bahwa status perempuan di Filipina lebih baik daripada Indonesia. Kita bisa melihat bahwa status ekonomi dan status perempuan dalam masyarakat sering berkorelasi, dimana negara yang sudah maju secara ekonomi seringkali status perempuannya lebih tinggi, akan tetapi hal ini tidak dapat secara otomatis diasumsikan demikian, contohnya Filipina. Bisa dilihat bahwa Filipina secara ekonomi kurang layak dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, begitu juga dengan situasi politiknya, namun tidak demikian dengan status perempuan di negara tersebut.

Jurnal Perempuan: Menurut anda bagaimana memperbaiki status perempuan di Asia Tenggara ke depan?

Patrick Ziegenhain: saya kira pembangunan ekonomi adalah satu solusi karena jika kondisi ekonomi meningkat maka akan terjadi perubahan terhadap status perempuan. Dan jika pembangunan ekonomi lebih baik, maka akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kesempatan kerja sehingga perempuan menjadi lebih maju. Tapi saya kira juga perlu beberapa syarat yang lain dan tidak hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi juga perlu perubahan sistem hukum dan administratif yang mencakup penghapusan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan penegakan hukum termasuk di dalamnya hakim yang tidak bias, tidak korup dan yang tahu hak-hak perempuan. *Legal framework* atau *administrative framework* ini penting sekali dan harus lebih kuat di Asia Tenggara. Selain itu yang juga tidak kalah penting adalah perubahan *mindset* sosial. Perubahan pola pikir tentang peran perempuan dalam masyarakat ini penting sekali mengingat masih banyak masalah terkait hal ini. Dan saya kira yang penting adalah mengurangi tradisi budaya dan interpretasi agama yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Ini masih menjadi masalah besar dan merupakan tantangan untuk masa depan situasi perempuan di Asia Tenggara. Singkatnya untuk memperbaiki situasi perempuan di Asia Tenggara diperlukan peningkatan situasi ekonomi secara umum selain juga dibutuhkan adanya perubahan administratif dan *social mindset*.

Jurnal Perempuan: Bicara tentang politik Asia Tenggara, dinasti politik menjadi fenomena yang cukup kuat, kita mengenal Aung San Suu Kyi atau Megawati Sukarnoputri misalnya, bagaimana anda melihat fenomena ini dalam konteks proses demokratisasi secara umum dan kemajuan

hak-hak perempuan secara khusus?

Patrick Ziegenhain: Saya kira dinasti politik itu masalah bagi demokratisasi. Contoh yang baik itu Filipina, di sana ada mungkin sekitar lima puluh keluarga besar yang mendominasi ekonomi dan politik yang tidak berbasis meritokrasi melainkan kekuatan feodalisme yang dimiliki seseorang dengan *privilege* sejak lahir. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kesamaan kesempatan bagi setiap orang. Karena itu saya kira perlu ada perubahan kebudayaan politik untuk membuka kemungkinan bagi orang biasa untuk masuk dalam politik dan mendapatkan posisi di jajaran pemerintahan atau DPR. Dan saya kira juga penting sekali untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat awam atas persoalan ini sehingga mereka tidak lagi memilih orang-orang yang berasal dari keluarga dinasti.

Untuk masalah perempuan, banyak memang perempuan yang mendapat posisi politik di Asia Tenggara yang datang dari dinasti politik. Ini ada dua sisi, di satu sisi perempuan mendapat posisi seperti presiden atau anggota DPR karena berasal dari keluarga dinasti adalah sebuah contoh baik bagi kenaikan posisi perempuan ke level yang tinggi, tetapi di sisi lain ini juga menjadi persoalan karena menurut saya akan lebih baik jika perempuan yang bukan berasal dari keluarga dinasti juga bisa maju dan mendapatkan posisi yang sama. Karena itu saya kira peran partai politik menjadi penting sekali. Negara dimana ada partai politik yang kuat dan kurang korup membuka kemungkinan bagi perempuan dengan latar belakang biasa untuk bisa meraih posisi puncak. Sistem pemilihan secara langsung mempersulitkan orang-orang di luar dinasti untuk bisa mendapatkan suara.

Jurnal Perempuan: Adakah karakteristik khusus terkait praktik dinasti politik di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara?

Patrick Ziegenhain: Indonesia memiliki banyak karakter khusus, meskipun juga ada banyak kesamaan dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Struktur politik yang ada di Indonesia sekarang masih dipengaruhi oleh sistem Orde Baru dan kelompok yang kuat pada waktu itu, sehingga meskipun sekarang ada perubahan, tetapi berjalan pelan. Masih banyak kekuatan Orde Baru yang masih bertahan sampai sekarang karena itu saya kira perlu lebih banyak waktu untuk membangun demokrasi di Indonesia, tetapi saya optimis dan saya juga melihat

banyak perubahan yang baik di Indonesia.

Jurnal Perempuan: Menurut anda apa persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun demokrasi?

Patrick Ziegenhain: Saya kira kesadaran politik masyarakat di Asia Tenggara belum tinggi karenanya perlu lebih banyak pendidikan politik untuk masyarakat biasa. Partai politik sampai sekarang gagal dalam membangun kesadaran politik anggotanya. Selain itu masalah yang biasa dihadapi oleh banyak negara di Asia Tenggara adalah lemahnya negara hukum dan tingkat korupsi yang tinggi. Saya kira *legal framework* sudah cukup baik di banyak negara tetapi implementasi hukum tidak berjalan dengan baik dan ditambah dengan banyaknya praktik korupsi.

Jurnal Perempuan: Kalau bicara tentang partai politik, bagaimana anda membandingkan situasi di Asia Tenggara dengan di Eropa?

Patrick Ziegenhain: Saya kira masalah yang dihadapi berbeda ya, di Eropa demokrasi sudah berjalan lama dengan ekonomi yang maju serta masalah yang dihadapi juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang ada di Asia Tenggara, hanya hal-hal seperti kenaikan pajak atau distribusi *welfare state* misalnya. Di Asia Tenggara ada masalah hak asasi manusia yang menjadi persoalan dasar untuk membangun demokrasi. Di Eropa orang sudah memiliki kesadaran atas hak politiknya sementara di Asia Tenggara harus ada perjuangan untuk merebut haknya. Selain itu masih ada banyak kekuatan otoriter di Asia Tenggara yang

menolak kekuatan demokrasi yang diperjuangkan sejumlah orang. Dan masih ada kekuatan besar seperti tentara di sejumlah negara, seperti Thailand contohnya. Serta birokrasi yang anti reformasi. Ini adalah masalah besar yang ada di Asia Tenggara.

Jurnal Perempuan: Bagaimana anda melihat proses demokratisasi di Indonesia ke depan?

Patrick Ziegenhain: Saya sangat mendukung Jokowi menjadi presiden karena saya berharap dia bisa mengubah banyak kelemahan di Indonesia, tetapi sekarang sepertinya mayoritas Indonesia sedikit kecewa dengan apa yang terjadi sejak lima bulan pelantikannya. Kita bisa melihat masih ada kekuatan politik yang sangat konservatif, yang sangat *powerful*, yang tidak mau reformasi dan yang tidak menginginkan demokrasi. Ini masalah besar, masih ada banyak kekuatan yang mau berhenti. Saya kira penting sekali untuk mendukung kekuatan progresif dalam politik dan masyarakat Indonesia dan juga kaum perempuan yang progresif. Saya kira ada juga kelompok perempuan yang sangat konservatif dalam bidang agama ya, mereka menuntut hukuman mati atau penerapan syariah yang ketat. Namun juga ada perjuangan kelompok perempuan yang progresif yang mau reformasi dan lebih demokrasi, serta menghargai kebebasan. Antara kelompok konservatif dan progresif harus ada toleransi dan rasa saling menghormati satu sama lain. Artinya, tidak boleh ada pemaksaan paham dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Saya berharap Indonesia dapat menjadi negara yang bisa menjamin kebebasan individu termasuk kebebasan individu perempuan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> <i>R. Valentina Sagala</i>	81-89
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i> <i>Yuyun Wahyuningrum</i>	91-98
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i> <i>Maria Ulfah Anshor</i>	99-105
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i> <i>Dwi Ruby Kholifah</i>	107-114
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i> <i>Masthuriyah Sa'dan</i>	123-131
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i> <i>Dian Lestariningsih</i>	133-138
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
• <i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
• <i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
• <i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
• <i>Lola Loveita</i>	

